

**ANALISIS FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT IMPLEMENTASI
PROGRAM BANK SAMPAH DALAM MENINGKATKAN *ECOLOGICAL
CITIZENSHIP* MASYARAKAT DESA PATARUMAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Faizal Rafli Saputro¹, Syaifullah², Mursyid Setiawan³

^{1,2,3}PPKN, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia

[¹faizal.rafli23@upi.edu](mailto:faizal.rafli23@upi.edu), [²syaifulsyam@upi.edu](mailto:syaifulsyam@upi.edu), [³mursyidsetiawan@upi.edu](mailto:mursyidsetiawan@upi.edu)

ABSTRACT

This study aims to analyze the supporting and inhibiting factors in the implementation of the waste bank program to improve ecological citizenship in the community of Pataruman Village, West Bandung Regency. This study uses a qualitative approach with a case study method that explains the real situation on the ground. The focus of this research is directed at the extent to which the waste bank program is optimal in improving ecological citizenship in Pataruman Village. However, implementation in the field still faces obstacles, such as a lack of facilities and infrastructure, limited funding, and limited human resources. It can be concluded that the implementation of the waste bank is progressing well, with gradual changes in the community's attitude toward waste as having economic value. This requires consistent government support regarding the sustainable waste bank program.

Keywords: Program Implementation, Waste Bank, Ecological Citizenship.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi program bank sampah dalam meningkatkan *ecological citizenship* masyarakat Desa Pataruman, Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus mampu menjelaskan keadaan nyata di lapangan. Fokus penelitian ini di arahkan pada sejauh mana program bank sampah ini optimal dalam meningkatkan *ecological citizenship* di Desa Pataruman. Namun implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan, seperti kurangnya sarana dan prasarana, keterbatasan pendanaan, keterbatasan sumber daya manusia. Dapat disimpulkan implementasi bank sampah berjalan dengan baik perlahan hasilnya terlihat perubahan masyarakat terhadap sampah yang memiliki nilai ekonomis dan perlu adanya konsistensi dari pemerintah berkaitan dengan program bank sampah secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi Program, Bank Sampah, *Ecological Citizenship*.

A. Pendahuluan

Permasalahan sampah masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta rendahnya kesadaran dalam pengelolaan sampah menyebabkan volume sampah terus meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan kesehatan dan sosial. Salah satu upaya yang dikembangkan pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi persoalan tersebut adalah melalui program bank sampah. Program bank sampah merupakan model pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang mengedepankan prinsip *reduce*, *reuse*, dan *recycle* (3R) serta memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat melalui kegiatan pemilahan dan pengumpulan sampah. Selain berkontribusi dalam pengurangan volume sampah, program bank sampah juga berpotensi membentuk kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan sebagai bagian dari praktik *ecological citizenship*.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa program bank sampah memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dan pengelolaan lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari dan Sugiyanto (2021, hlm. 169-179) menunjukkan bahwa pengelolaan bank sampah mampu mengubah pemahaman serta perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. Mulai dari proses pelaksanaan hingga hasil yang diperoleh, kegiatan bank sampah melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai faktor utama keberhasilan program. Selanjutnya, penelitian Hermanto dan Nur Azura (2023, hlm. 155-181) menunjukkan bahwa inovasi sosial menjadi strategi penting agar program bank sampah di Kabupaten Bandung Barat dapat berkembang dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Melalui forum diskusi bersama masyarakat, berbagai kendala internal maupun eksternal yang dihadapi bank sampah dapat diidentifikasi dan dicari solusi secara bersama-sama.

Sementara itu, penelitian Hakikah (2024, hlm. 203-214) menunjukkan bahwa pengelolaan bank sampah masih belum berjalan

secara optimal karena menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat teknis maupun nonteknis. Kendala tersebut meliputi keterbatasan sumber daya, sarana dan prasarana, serta dukungan kelembagaan yang belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mendukung keberlangsungan program bank sampah, khususnya melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai guna meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada aspek pengelolaan sampah, manfaat ekonomi, tingkat partisipasi masyarakat, atau efektivitas program bank sampah dalam mengurangi volume sampah. Kajian yang secara khusus menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi program bank sampah dalam kaitannya dengan pembentukan *ecological citizenship* masyarakat masih relatif terbatas, terutama pada konteks masyarakat pedesaan. Selain itu, penelitian mengenai implementasi program bank

sampah di Desa Pataruman, Kabupaten Bandung Barat, belum banyak dilakukan. Padahal, Desa Pataruman merupakan salah satu wilayah yang mengembangkan program bank sampah sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait hubungan antara implementasi program bank sampah dengan proses pembentukan *ecological citizenship* masyarakat, khususnya dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan program tersebut.

Ecological citizenship yang disampaikan oleh Andrew Dobson (2003, hlm. 131-150) menegaskan bahwa praktik kewarganegaraan tidak dapat dibatasi semata-mata pada dimensi legal dan formal yang berlandaskan status hukum dan hak konstitusional. Kewarganegaraan dalam perspektif ini dipahami sebagai konstruksi normatif yang melampaui relasi antara warga dan negara, dengan menempatkan tanggung jawab etis sebagai fondasi utama. Dobson memandang bahwa individu memiliki kewajiban moral untuk berkontribusi terhadap keberlanjutan

ekologis, tidak hanya dalam lingkungan nasional, tetapi juga pada tataran kelestarian lingkungan global. Selain itu, *Ecological citizenship* menekankan tanggung jawab, baik secara individu maupun kolektif, dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, yang tidak terbatas pada kepatuhan terhadap ketentuan hukum ataupun norma sosial semata (Schlindwein & Montalvo, 2023, hlm. 180).

Secara umum, aspek kewarganegaraan dari gerakan pertumbuhan kewarganegaraan ekologis (*ecological citizenship*) terdiri dari empat fase (Fatmalasari dkk., 2019, hlm. 45–59). Pertama, *environmental knowledge*, yang mengacu pada pemahaman dan pengalaman yang terkait dengan interaksi dengan dunia alam, yang bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan keberlangsungan lingkungan, baik pada tingkat pribadi maupun organisasi. Kedua, *environmental skills*, yang mencakup kemampuan yang diperlukan untuk mengenali, mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi tantangan lingkungan, baik sebagai individu, dalam kelompok, maupun dalam organisasi. Ketiga, *environmental*

attitudes, yang mencakup kumpulan kepercayaan dan emosi mengenai lingkungan, bersama dengan dorongan untuk terlibat aktif dalam pelestarian dan kemajuan ekologis, baik secara pribadi, sebagai bagian dari kelompok, maupun dalam organisasi. Keempat, *environmental participation*, yang menggambarkan proses di mana individu menumbuhkan kesadaran akan masalah ekologis dan berupaya menerjemahkan kesadaran tersebut ke dalam tindakan nyata melalui berbagai kegiatan pro lingkungan.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, artikel ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis implementasi program bank sampah tidak hanya dari aspek pengelolaan sampah dan partisipasi masyarakat, tetapi juga dari perspektif *ecological citizenship*. Penelitian ini mengintegrasikan teori implementasi program, partisipasi masyarakat, dan *ecological citizenship* untuk menjelaskan bagaimana faktor pendukung dan penghambat program bank sampah dapat memengaruhi terbentuknya kesadaran, tanggung jawab, serta perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan

dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya yang berkaitan dengan kewarganegaraan ekologis dan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi program bank sampah dalam meningkatkan *ecological citizenship* masyarakat Desa Pataruman, Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi keberhasilan program dalam membentuk kesadaran dan praktik kewarganegaraan ekologis masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi program bank sampah, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program, serta

kontribusinya dalam meningkatkan *ecological citizenship* masyarakat Desa Pataruman. Peneliti menggunakan metode studi kasus ini karena untuk mengatasi masalah penelitian yang melibatkan hubungan antarvariable, sekaligus untuk mengeksplorasi fenomena terhadap objek penelitian, serta dapat memberikan saran kepada para pemangku kepentingan karena permasalahan yang terjadi terkait faktor pendukung dan penghambat implementasi program bank sampah di Desa Pataruman.

Studi ini menggunakan pendekatan studi kasus sebagai metode penelitiannya. Menurut Creswell, studi kasus melibatkan investigasi mendalam terhadap “sistem terbatas” atau kasus tertentu (atau beberapa kasus) selama periode tertentu, menggunakan data komprehensif yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang kaya dalam konteksnya. Istilah “sistem terbatas” mengacu pada batasan yang ditentukan oleh waktu dan tempat, sedangkan kasus itu sendiri dapat berupa program, peristiwa, aktivitas, individu, atau kelompok sosial. Pada intinya, studi kasus memungkinkan peneliti untuk memeriksa fenomena

spesifik dalam kerangka waktu atau pengaturan yang ditentukan, seperti program, proses, institusi, atau komunitas, dengan mengumpulkan informasi yang detail dan menyeluruh melalui berbagai teknik pengumpulan data selama periode yang berkelanjutan (Creswell, 1998).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan di Desa Pataruman, Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pengelola bank sampah, masyarakat, serta pihak yang terlibat dalam kegiatan lingkungan, ditemukan beberapa faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program bank sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program bank sampah didukung oleh keterlibatan masyarakat, peran aktif pengelola, kegiatan edukasi lingkungan, serta adanya kerja sama dengan berbagai pihak. Faktor-faktor tersebut terlihat dalam proses pengumpulan, pemilahan, penimbangan, dan pengelolaan sampah yang dilakukan secara bersama antara pengelola dan masyarakat.

Implementasi Program Bank Sampah di Desa Pataruman.

Implementasi program bank sampah di Desa Pataruman merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan sampah sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Program ini hadir sebagai bentuk pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang melibatkan warga secara langsung dalam kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pemanfaatan sampah yang memiliki nilai ekonomis. Pelaksanaan program bank sampah tidak hanya berorientasi pada pengurangan volume sampah, tetapi juga diarahkan untuk membangun kebiasaan dan tanggung jawab masyarakat dalam menjaga lingkungan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi program bank sampah diawali dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pengelola kepada masyarakat di berbagai wilayah Desa Pataruman. Sosialisasi dilaksanakan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan sampah, mekanisme kerja bank sampah, serta manfaat yang dapat

diperoleh masyarakat melalui program tersebut. Salah satu bentuk sosialisasi dilakukan di RW 11 dan RW 12 yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan posyandu. Pemilihan kegiatan posyandu sebagai media sosialisasi dinilai efektif karena mampu menjangkau masyarakat secara langsung, khususnya ibu rumah tangga yang memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

Sejalan dengan penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III sebagaimana dikutip dalam Widodo (2010, hlm. 104). Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan suatu program dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut menjadi unsur penting yang menentukan apakah suatu program dapat dilaksanakan secara efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam implementasi program adalah komunikasi. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, aspek komunikasi telah terjalin melalui beberapa bentuk

komunikasi antaraktor yang terlibat. Komunikasi antara pengelola bank sampah dan masyarakat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pada berbagai kegiatan kemasyarakatan, salah satunya dalam kegiatan posyandu. Pada kegiatan tersebut, pengelola maupun koordinator bank sampah menyampaikan informasi mengenai tujuan, manfaat, serta mekanisme pelaksanaan program bank sampah kepada warga, khususnya ibu-ibu yang hadir.

Seperti yang dikemukakan oleh Herlina dkk. (2022, hlm. 497–508) model pengelolaan bank sampah berbasis partisipasi masyarakat menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam seluruh proses pengelolaan sampah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Dalam model ini, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh peran pengelola atau pemerintah, tetapi juga sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.

Tujuan utama program bank sampah adalah mengurangi jumlah sampah sejak dari sumbernya,

meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan, serta mendorong terbentuknya perilaku yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah. Selain itu, program bank sampah juga memberikan manfaat ekonomi melalui sistem tabungan sampah yang memungkinkan masyarakat memperoleh tambahan pendapatan dari sampah yang mereka kumpulkan dan pilah. Dengan demikian, bank sampah tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengelolaan lingkungan, tetapi juga sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga.

Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Bank Sampah

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan program bank sampah di Desa Pataruman. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat program, tetapi juga terlibat secara langsung dalam berbagai kegiatan yang mendukung keberlangsungan

bank sampah. Keterlibatan masyarakat tersebut menunjukkan adanya kesadaran bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mendukung upaya pengelolaan sampah yang lebih baik.

Pertama, bentuk partisipasi masyarakat yang paling terlihat adalah keterlibatan dalam kegiatan pemilahan dan penyetoran sampah. Kedua, partisipasi masyarakat juga terlihat dari kehadiran warga dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh pengelola bank sampah. Sosialisasi yang dilaksanakan di beberapa wilayah, seperti RW 11 dan RW 12, mendapatkan respons yang cukup baik dari masyarakat. Ketiga, partisipasi masyarakat juga terlihat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan program bank sampah. Salah satu contohnya adalah kesepakatan bersama mengenai sistem pencairan tabungan sampah yang dilakukan satu kali dalam setahun menjelang Hari Raya Idulfitri.

Sejalan dengan pandangan Coleman, Putnam (1993, hlm. 35) mendefinisikan modal sosial sebagai karakteristik organisasi sosial yang terdiri atas jaringan, norma, dan

kepercayaan yang mampu mendorong terjadinya kerja sama dan tindakan kolektif untuk mencapai manfaat bersama. Sementara itu, Bourdieu (1980, hlm. 21–24) memandang modal sosial sebagai sumber daya yang dimiliki individu maupun kelompok melalui hubungan yang terjalin dalam suatu jaringan sosial, baik yang bersifat formal maupun informal.

Keterkaitan dengan teori modal sosial tersebut dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilahan dan penyetoran sampah. Kesiediaan masyarakat untuk secara rutin mengumpulkan dan menyetorkan sampah tidak hanya didorong oleh manfaat ekonomi yang diperoleh, tetapi juga oleh adanya rasa tanggung jawab bersama terhadap lingkungan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Bank Sampah dalam Meningkatkan *Ecological citizenship*

Implementasi program bank sampah di Desa Pataruman tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya. Keberadaan faktor-faktor tersebut sangat memengaruhi

keberlangsungan program serta pencapaian tujuan dalam meningkatkan *ecological citizenship* atau kesadaran kewarganegaraan ekologis masyarakat. Melalui program bank sampah, masyarakat didorong untuk tidak hanya memahami pentingnya menjaga lingkungan, tetapi juga menerapkan perilaku yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.

Pertama, salah satu faktor pendukung utama dalam implementasi Program Bank Sampah di Desa Pataruman adalah adanya partisipasi masyarakat yang cukup baik dalam berbagai kegiatan pengelolaan sampah. Kedua, faktor pendukung peran aktif pengelola bank sampah dalam menjalankan berbagai kegiatan program. Pengelola tidak hanya berfokus pada aspek operasional, tetapi juga berperan dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang baik dan benar.

Ketiga, faktor pendukung terjalannya komunikasi dan kerja sama yang baik antara pengelola bank sampah, masyarakat, dan pemerintah desa. Hubungan yang harmonis ini

memungkinkan adanya dukungan nyata dari pemerintah desa, baik dalam bentuk kebijakan maupun penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung operasional bank sampah.

Faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaan program bank sampah. Pertama, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan program bank sampah. Berdasarkan hasil penelitian, lokasi yang digunakan masih bersifat sementara, yaitu di RW 11 memanfaatkan posyandu dan di RW 12 menggunakan halaman rumah warga.

Kedua, keterbatasan pendanaan juga menjadi faktor penghambat dalam pengembangan program bank sampah. Dana yang tersedia belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan operasional, seperti penyediaan fasilitas pendukung.

Ketiga, masih adanya sebagian masyarakat yang belum berpartisipasi secara aktif menjadi hambatan dalam pelaksanaan program bank sampah. Meskipun kesadaran masyarakat mulai meningkat, tingkat keterlibatan yang belum merata menunjukkan

bahwa perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah membutuhkan waktu dan proses yang berkelanjutan.

Selaras dengan teori implementasi kebijakan yang disampaikan oleh Edward III, sebagaimana dikutip dalam Widodo (2010, hlm. 104), keberhasilan suatu program sangat dipengaruhi oleh aspek komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi.

Selaras dengan teori *ecological citizenship* yang dikemukakan oleh Dobson (2003, hlm. 131–150), faktor pendukung implementasi Program Bank Sampah di Desa Pataruman dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab moral masyarakat dalam menjaga lingkungan melalui berbagai bentuk partisipasi.

Proses Pembentukan Praktik dan Kesadaran *Ecological Citizenship* melalui Program Bank Sampah

Program bank sampah tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengelolaan sampah, tetapi juga menjadi media pembelajaran bagi masyarakat dalam membangun kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Tahapan sosialisasi, proses pembentukan kesadaran *ecological*

citizenship diawali melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pengelola bank sampah kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, dampak negatif sampah terhadap kesehatan dan lingkungan, serta manfaat yang dapat diperoleh dari pengelolaan sampah yang baik.

Berdasarkan temuan di lapangan, kegiatan sosialisasi program bank sampah di RW 11 dan RW 12 Desa Pataruman dilaksanakan melalui pertemuan warga, kegiatan PKK, serta forum musyawarah lingkungan yang melibatkan pengelola bank sampah, perangkat desa, dan masyarakat setempat.

Tahapan peningkatan pengetahuan, melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi program bank sampah menunjukkan dampak yang positif terhadap partisipasi warga. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah anggota bank sampah di RW 11 dan RW 12 Desa Pataruman. Di RW 11, yang merupakan wilayah pertama pelaksanaan program bank sampah, jumlah anggota terus bertambah sejak program mulai diperkenalkan kepada

masyarakat, menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran warga mengenai pentingnya pengelolaan sampah.

Tahapan pembiasaan perilaku dalam program bank sampah ditandai dengan semakin rutin dilaksanakannya kegiatan gotong royong oleh masyarakat di RW 11 dan RW 12 Desa Pataruman. Kegiatan gotong royong dilakukan secara berkala dalam bentuk kerja bakti membersihkan lingkungan, saluran air, area fasilitas umum, serta pengumpulan dan pemilahan sampah yang melibatkan warga secara bersama-sama.

Jika dikaitkan dengan teori *ecological citizenship* yang dikemukakan oleh Dobson (2003, hlm. 131–150), proses yang terjadi di Desa Pataruman menunjukkan bahwa masyarakat mulai mengembangkan kesadaran moral terhadap lingkungan. Masyarakat tidak hanya menjalankan kegiatan bank sampah karena adanya manfaat ekonomi, tetapi juga karena tumbuhnya kesadaran bahwa lingkungan yang bersih dan sehat merupakan kepentingan bersama yang harus dijaga. Kesadaran tersebut mendorong masyarakat untuk

mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang dilakukan terhadap lingkungan serta masa depan generasi berikutnya.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Nugroho bahwa *ecological citizenship* melibatkan pengembangan kelompok masyarakat, pengakuan atas kontribusi masyarakat, peran masyarakat dalam berbagai inisiatif lingkungan, serta kesadaran masyarakat atau tindakan yang diambil dalam mengatasi tantangan lingkungan (Nugroho, 2021, hlm. 8). Sebaliknya, Georgiou dkk. menunjukkan bahwa gagasan *ecological citizenship* muncul sebagai respons terhadap krisis lingkungan global dan dipandang penting untuk dimasukkan dalam pendidikan kewarganegaraan (Georgiou dkk., 2021, hlm. 26–32).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Program Bank Sampah dalam Meningkatkan Ecological Citizenship Masyarakat Desa Pataruman Kabupaten Bandung Barat, dapat disimpulkan bahwa program bank sampah telah memberikan kontribusi positif dalam mendorong perubahan perilaku

masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan kepedulian lingkungan. Implementasi program dilakukan melalui tahapan sosialisasi, pemilahan sampah dari sumber, pengumpulan, penimbangan, pencatatan tabungan sampah, hingga penjualan sampah yang memiliki nilai ekonomi. Pelaksanaan program melibatkan kerja sama antara pengelola bank sampah, pemerintah desa, pengurus RT/RW, dan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam program ini tergolong cukup baik, yang terlihat dari keterlibatan mereka dalam memilah sampah dari rumah, menyetorkan sampah ke bank sampah, mengikuti kegiatan kebersihan lingkungan, serta berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong.

Meskipun demikian, implementasi program masih menghadapi beberapa hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum memadai, keterbatasan pendanaan, rendahnya konsistensi sebagian masyarakat dalam memilah dan menyetorkan sampah, serta adanya persaingan dengan pengepul atau tukang rongsok keliling yang menawarkan harga lebih tinggi. Di sisi lain, faktor pendukung

program meliputi dukungan masyarakat, keluarga, pengurus RT/RW, pemerintah desa, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Melalui proses edukasi, sosialisasi, pembiasaan, dan keterlibatan langsung dalam kegiatan pengelolaan sampah, program bank sampah telah mendorong terbentuknya praktik dan kesadaran ecological citizenship yang ditandai dengan berkembangnya kebiasaan memilah sampah, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan, serta mengajak warga lain untuk berpartisipasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bourdieu, P. (1980). The Forms of Capital. Dalam J. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. Westport: Greenwood Press
- Creswell, J.W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Tradition*. London: Sage Publications
- Dobson, A. (2003). *Citizenship and the Environment*. Oxford University Press. 31Manusia. *Majalah Hukum Nasional*, 51(2), 131–150.

Fatmalasari, H., Yuliandari, E., & Gunawati, D. (2019). Penguatan Ecological Citizenship sebagai Upaya Mengubah Perilaku Masyarakat Sadar Akan Lingkungan melalui Program Kampung Selo Beraksi. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Kewarganegaraan*, 14(1), 45–59.

Georgiou, Y., Hadjichambis, A. C., & Hadjichambi, D. (2021). Teachers' Perceptions on Environmental Citizenship: A Systematic Review of the Literature. *Sustainability*, 13(5), 2622.

Hakikah, N. N. (2024). Bank sampah sebagai strategi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di desa cibenda kecamatan parigi Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Otonomi*. 1(2). 203-214.

Herlina, D. N., Wahyuni, Y. T., Anisa, F. Z., Purnomo, S. D., & Retnowati, D. (2022). Business Feasibility Test and Community-Based Waste Management Model in Kutasari Village, Banyumas District. *Procedia of Social Sciences and Humanities*, 3, 497-508.

Nugroho, D. A. (2021). *Ecological Citizenship (Kewarganegaraan Ekologis) dalam perspektif Teori dan Riset*. Banyumas: Amerta Media.

Purnamasari, L., Sugiyanto. (2021). Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2). 169-179.

- Putnam, Robert D., Robert Leonardi, and Raffaella Y. Nanetti. 1993. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Rasmini, M., Sukoco, I., Hermanto, B., Sanusi, N., A. (2023). Social Innovation process in creating social innovation at trash banks in west Bandung regency in 2021-2022. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*. 8(2). 155-181.
- Schlindwein, L. F., & Montalvo, C. (2023). Energy citizenship: Accounting for the heterogeneity of human behaviours within energy transition. *Energy Policy*, 180, 113662.
- Widodo. (2010). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan*